



PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT

Murni Purnama Sari

murnipurnama99@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Mellya Embun Baining

mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Saijun

saijunjun40@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: murnipurnama99@gmail.com

Abstract : *Financial literacy is a basic need for everyone to avoid financial problems. Financial difficulties are not only a function of income alone (low income), financial difficulties can also arise in the event of errors in financial management (miss-management) such as the use of credit errors, and the absence of financial planning. Financial constraints can cause stress and low self-confidence, even for some families these conditions can lead to divorce. Having financial literacy, is vital to get a prosperous and quality life. Financial literacy, together with reading and math skills, is the key to becoming a smart consumer, managing credit, funding higher education, saving and investing, and a responsible citizen. This type of research is Field Research and data obtained from observations, interviews and documentaries. This study uses descriptive analysis with a qualitative approach. The location of the study was conducted at the Office of OJK (Financial Services Authority) Jambi province*

Keywords: *Role OJK, Financial Literacy*

Abstrak : Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (miss-management) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stres dan rendahnya kepercayaan diri, bahkan untuk sebagian keluarga kondisi tersebut dapat berujung pada perceraian. Memiliki literasi keuangan, merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa literasi keuangan bersama-sama dengan kemampuan membaca dan matematik merupakan kunci untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas, mengelola kredit, dan mendanai pendidikan tinggi, saving dan investing, dan warga negara yang bertanggung jawab. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumenter. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Jambi.

Kata Kunci: *Peran OJK, Literasi Keuangan*

PENDAHULUAN

Organisation for economic Co-operation and development atau OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dari resiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu, masyarakat dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2019 dari hasil survei nasional literasi keuangan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan rendahnya pemahaman terhadap produk atau layanan jasa keuangan ini mengakibatkan keberagaman penggunaproduk keuangan masyarakat masih belum merata disetiap lembaga jasa keuangan.

Menurut data Bank Dunia, indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah setelah india dan cina. Kondisi tersebut jelas kurang

menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat sejalan dengan tingkat pemahaman keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan.

Praktek ekonomi yang *eklusif* menjadi belenggu kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan terobosan untuk menghasilkan kehidupan ekonomi yang *inklusif*. Sistem layanan keuangan yang *inklusif* sejatinya merupakan ikhtiar untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang tidak hanya mengakomodasi kalangan berada namun juga memihak kalangan berpenghasilan rendah dan miskin. Penyebab kemiskinan adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi serta tidak meratanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, dalam arti merata dan berkualitas.

Literasi keuangan memiliki peranan dalam meningkatkan pemahaman pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam literasi keuangan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk indonesia dibagi menjadi empat bagian yaitu, *well literate, sufficient literate, less literate, not literate*.

OJK sebagai sebuah regulator keuangan meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar upaya peningkatan literasi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Pada tahun 2019 hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) yang dilakukan oleh OJK memperlihatkan bahwa Indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 38,03% dan indeks inklusi sebesar 76,19%. Menurut data bank dunia, Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah setelah India dan Cina.

Tabel 1.1

Hasil survei literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) Tahun 2019

No	Provinsi	Tingkat literasi keuangan	Tingkat inklusi keuangan
1.	Aceh	44,35 %	86,09%
2.	Sumatera Utara	37,96%	93,98%
3.	Sumatera Barat	34,55%	66,75%
4.	Riau	43,19%	86,39%
5.	Jambi	35,17%	64,83%
6.	Sumatera Selatan	40,05%	85,08%
7.	Bengkulu	34,12%	85,56%
8.	Lampung	30,97%	61,94%
9.	Bangka Belitung	35,70%	64,57%
10.	Kepulauan Riau	45,67%	92,13%
11.	DKI Jakarta	59,16%	94,76%
12.	Jawa Barat	37,43%	88,48%
13.	Jawa Tengah	47,38%	65,71%
14.	DIY. Yogyakarta	58,53%	76,12%
15.	Jawa Timur	48,95%	87,96%
16.	Banten	39,27%	84,29%
17.	Bali	38,06%	92,91%
18.	NTB	34,65%	62,73%
19.	NTT	27,82%	60,63%

Tahun 2020 Tentang strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI). Melalui peraturan ini presiden menargetkan keuangan inklusif secara nasional pada tahun 2024 sebesar 90 persen. Indeks literasi keuangan Provinsi Jambi sebesar 35,17 persen dan untuk inklusi keuangan tercatat sebesar 64,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa deviasi yang cukup besar yang artinya diperlukan strategi dalam mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Otoritas jasa keuangan (OJK) Provinsi jambi targetkan angka literasi dan inklusi keuangan jambi di atas angka nasional. Angka inklusi keuangan masyarakat jambi di angka 64,83 persen dan literasi keuangan jambi sebesar 35,17 persen sehingga OJK menargetkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di atas angka nasional. Kepala kantor OJK Provinsi Jambi mengatakan, inklusi keuangan provinsi jambi masih di bawah angka nasional. OJK Jambi menargetkan mampu meningkatkan minimal setara dengan angka indeks inklusi keuangan nasional yakni sebesar 76,19 persen.

Literasi keuangan harus dapat mengedukasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

OJK menambahkan ada dua hal utama yang perlu didorong yaitu perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Itu yang akan menjadikan industri jasa keuangan menjadi mitra masyarakat. Dalam mewujudkan itu semua, kerjasama yang erat antara otoritas jasa keuangan, pemerintah dan industri jasa keuangan sangatlah dibutuhkan. Dimana literasi keuangan dapat berjalan dengan baik apabila di dukung pula dengan program keuangan inklusif yang mana bila kedua program tersebut dijalankan dapat menghasilkan usage/manfaat yang baik. Inklusi keuangan sendiri bermakna sebagai sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, non eksklusif yang dapat memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat.

Literasi keuangan mengarahkan setiap individu agar mampu menggunakan instrumen-instrumen dan produk –produk keuangan serta mampu membuat keputusan keuangan yang tepat dalam pengelolaan keuangan sehingga memiliki kesejahteraan *financial cude et al* (2006: 23) menyatakan bahwa seiring berkembangnya instrumen keuangan, tidak diiringi oleh keinginan masyarakat untuk memulai berinvestasi, dan di duga salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan. Orton (2007; dalam Irman, 2018:181) memperjelaskan dengan menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang, karena literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman di berbagai negara masih menunjukkan relatif kurang tinggi. Byrne (2007:45) juga menemukan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan bisa dalam pencapaian kesejahteraan di usia tidak lagi produktif.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuanga juga merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan keuangan inklusi yang mana tahapan ini mengandung muatan-muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan. Tahap literasi ini penting dalam sektor keuangan,

tanpa bisa memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, dapat menyebabkan potensi menjadi korban transaksi keuangan.

Aktivitas yang paling penting dalam tahapan ini adalah sosialisasi dan edukasi secara masif terkait jenis, karakter, dan profil risiko masing-masing produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan yang baik.

Literasi tidak akan tercapai hanya dengan membangun kesadaran terhadap sektor keuangan saja melainkan harus ada program penunjang literasi tersebut. dalam hal ini terdapat empat tahapan dalam literasi keuangan yaitu *literasi, penetration, density, dan delivery*.

- a. *Literacy*, merupakan perangkat utama dalam mewujudkan financial inclusion, tahapan ini mengandung muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan dengan program yang dijalankan seperti edukasi dan kampanye nasional yang di lakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat.
- b. *Penetration*, merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan. Kebutuhan paling penting dalam tahap ini adalah *supply side* layanan keuangan, baik yang berupa produk maupun infrastruktur layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam program strategi yang di lakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan program seperti kuliah umum, *training of trainer, edu expo*.
- c. *Density*, merupakan tahap di mana kondisi masyarakat sebagai konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah berada dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun jalinan kerjasama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah adanya desain produk dan layanan keuangan yang menarik dan dapat diterima di pasar. KUR merupakan contoh dari segi Density.
- d. *Delivery*, merupakan tahap dimana literasi keuangan dan financial inclusion sudah terjadi, ditandai dengan fakta bahwa produk dan layanan keuangan yang dapat diterima dengan baik oleh pasar. Pada tahap ini kebutuhan yang paling penting adalah lembaga keuangan harus memilih jalur distribusi (*delivery channel*) yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat kecil, dan murah. Seperti pada program laku pandai yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

2. Pengertian inklusi keuangan

Inklusi keuangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan. Inklusi sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Inklusi keuangan memungkinkan orang menabung untuk kebutuhan keluarga meminjam untuk mendukung bisnis, membangun bantalan terhadap keadaan darurat. Memiliki akses ke layanan keuangan merupakan langkah penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dan data baru tentang kepemilikan telpon seluler dan akses internet menunjukkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelum untuk menggunakan teknologi guna mencapai inklusi keuangan universa.

A. Hambatan inklusi keuangan

Inklusi keuangan tidak hanya dicerminkan dari kepemilikan rekening tabungan di bank, namun masyarakat memiliki kesadaran untuk menggunakan produk-produk keuangan. Setiap lapisan masyarakat seharusnya dipastikan mendapat kemudahan akses terhadap jasa keuangan. Dengan demikian, pelayanan bank menjadi salah satu layanan publik yang menyentuh dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adanya inklusi keuangan dapat menghilangkan hambatan baik yang terkait dengan biaya maupun yang tidak ada kaitannya dengan biaya. Tidak dapat dipungkiri, selama ini banyak masyarakat berpenghasilan rendah tidak menggunakan layanan perbankan karena alasan biaya yang terlalu mahal. Tidak hanya itu, pada dasarnya banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki rekening bank atau unbanked, dan akses layanan keuangan lainnya. Hambatan dalam inklusi keuangan dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu hambatan yang berasal dari masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan (demand side factors) dan hambatan yang berasal dari penyedia jasa keuangan (supply side factors).

3. Dasar Literasi Keuangan

Yang menjadi dasar adanya program literasi keuangan adalah adanya temuan dari data Bank Dunia bahwa tingkat akses masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal hanya sebesar 36,1% atau lebih rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya seperti, Thailand, Malaysia dan Singapura. Selain itu pula yang menjadi alasan pentingnya literasi keuangan adalah angka rasio savings to GDP Indonesia yaitu sekitar 31%, lebih rendah dari Singapura sebesar 49%, Filipina sebesar 46%, serta China 49%.

Hal ini dipengaruhi juga tingkat literasi masyarakat Indonesia yang mana pengertian dari literasi keuangan sendiri adalah setiap orang memiliki pengetahuan yang memadai untuk merencanakan dan mengatur keuangan pribadinya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Tingkat literasi yang memadai dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya dikarenakan rendahnya pendapatan seseorang, kesulitan keuangan yang dialami oleh seseorang bukan dari pendapatan semata, tetapi bisa juga disebabkan karena kesalahan manajemen keuangan.

4. Aspek Literasi Keuangan

Literasi keuangan mencakup banyak aspek yang perlu diukur. Literasi keuangan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya pada negara-negara maju. Istilah literasi keuangan adalah kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusan dalam hal pengaturan keuangan pribadinya. literasi keuangan dibagi menjadi empat aspek, yaitu:

- a. Pengetahuan keuangan dasar (basic financial knowledge) yang mencakup pengeluaran, pendapatan, aset, hutang, ekuitas, dan risiko. Pengetahuan dasar ini biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau pembiayaan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang yang dimiliki.
- b. Simpanan dan pinjaman (saving and borrowing), merupakan produk perbankan yang lebih dikenal sebagai tabungan dan kredit. Tabungan merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya akan cenderung menyimpan sisa uangnya tersebut untuk kebutuhan di masa depan.
- c. Proteksi atau asuransi (insurance) merupakan suatu bentuk perlindungan secara finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan. Tujuan dari proteksi adalah untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi

- hal yang tidak terduga seperti kematian, kehilangan, kecelakaan, atau kerusakan. Untuk mendapatkan asuransi yang mudah dan murah serta tidak berbelit, masyarakat cukup datang ke gerai toko ritel waralaba tak jauh dari rumah. Polisnya sederhana, ringkas, tidak berbelit. Secara umum, hampir semua jenis produk asuransi yang ada, baik konvensional maupun syariah, dapat menjadi asuransi mikro. Jenisnya beragam. Ada asuransi jiwa mikro, asuransi mikro demam berdarah, asuransi kecelakaan, asuransi tani, asuransi nelayan, asuransi kebakaran, dan masih banyak lagi. Yang membedakan produk asuransi mikro adalah karakteristiknya yang khas. Sesuai namanya, produk asuransi mikro tentunya sederhana, mudah, ekonomis, dan segera. Produk asuransi mikro haruslah mudah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, baik dari sisi ketersediaan maupun harga. Umumnya, premi yang ditetapkan untuk satu produk asuransi mikro tidak lebih dari Rp.50.000. Bahkan ada pula yang hanya Rp.20.000 seperti produk asuransi Capital Eka Proteksi atau Cakap dari PT. Capital Life Indonesia, yang merupakan produk asuransi mikro dengan premi tunggal seharga Rp.20.000 artinya hanya dengan membayar Rp.20.000 sebanyak satu kali, nasabah bisa memperoleh perlindungan pertanggungan jiwa selama 6 bulan. Investasi merupakan suatu bentuk kegiatan penanaman dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. Bentuk investasi bisa berupa aset riil (properti atau emas), aset keuangan (saham, deposito, obligasi, dan aset keuangan lainnya), dan lain-lain.
- d. Investasi merupakan suatu bentuk kegiatan penanaman dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. Bentuk investasi bisa berupa aset riil (properti atau emas), aset keuangan (saham, deposito, obligasi, dan aset keuangan lainnya), dan lain-lain.

5. Tingkat Literasi Keuangan

Terdapat berbagai tingkatan dalam literasi keuangan untuk menilai seberapa baik literasi keuangan yang dikuasai oleh seseorang. Berikut ini adalah 4 tingkat literasi keuangan berdasarkan yang dikeluarkan oleh OJK.

1. Melek huruf dengan baik, apabila ada seseorang yang berada pada tingkatan ini, maka orang tersebut berarti mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan. Selain itu, orang-orang tersebut juga sudah memperkenalkan produk dan jasa keuangan di dalamnya. Jadi, orang tersebut paham betul akan fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Mereka juga mempunyai kemampuan yang baik dalam memanfaatkan produk serta jasa keuangan.
2. Cukup Terpelajar, dalam tingkatan ini, seseorang mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan dan produk dari jasa keuangan. Selain itu, orang-orang tersebut juga sudah mengenal fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. Kurang Melek Huruf
Mereka yang berada pada tingkatan ini memiliki pengetahuan terkait lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan saja, tidak lebih.

Tujuan Literasi Keuangan

Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less* literasi keuangan atau *not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan resiko,

mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar seperti:

- a. Mampu memilih dan memanfaatkan produk layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
- b. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- c. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

Fungsi Dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

- a. Integritas yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
 - b. Profesionalisme yaitu Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
3. Sinerg yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
 4. Inklusif yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
 5. Visioner yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan serta dapat berfikir diluar kebiasaan.

Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-Undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Penjelasan tersebut diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dibutuhkannya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam suatu lembaga. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan di bidang teknologi juga inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang begitu kompleks, dinamis dan saling terkait antar subjektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Selain alasan tersebut Undang-Undang OJK dibuat dengan semangat untuk mengurangi moral hazard dalam sektor jasa keuangan, kemudian mengoptimalkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Salah satu karakter ristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercermin dalam amanat pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar :

- a. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan adil;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan

Peran otoritas jasa keuangan berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi, mengatur, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai kewenangan di bidang edukasi dan juga mengatur mengenai kewenangan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang dapat dikatakan baru pertama kali peraturan perundang-undangan dibidang keuangan mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 28-31 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu ;

- a. Memberikan informasi dan edukasi
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat
- c. Melakukan pelayanan pengaduan konsume, Melakukan pembelaan hukum
- d. Mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan konsumen

2. Investasi Bodong

Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara investasi bodong lebih mengarah penipuan, sehingga bukan untung yang didapat, tetapi justru kerugian. Semakin mudahnya informasi yang didapat oleh individu terkait investasi, membuat makin maraknya penipuan investasi bodong. Kasus investasi bodong 'Share Results' ini merupakan jaringan internasional, dimana pelaku aktor utama money game skema 'Ponzi' ini berada di Malaysia. Tersangka pun tidak mengetahui tujuan pembukaan rekening yang dilakukan tersebut.

Hingga saat ini korban investasi bodong Share Results terdata sebanyak 385 peserta. Sebagian besar sebanyak 346 peserta berada di Provinsi jambi dan selebihnya berada diluar Provinsi Jambi. Adapun jumlah kerugian dari seluruh peserta sebanyak Rp2,1 miliar. Sementara itu Kepala OJK Provinsi Jambi, juga meminta agar masyarakat berhati-hati dalam menyikapi tawaran investasi. Pakailah prinsip 2 L, L pertama, cek legalitas, dengan carai hubungi OJK call center 157. Karena kata dia, lembaga yang aman adalah yang telah mendapat izin OJK. Kemudian L yang ke 2, layak atau logis tidak bagi hasil yang ditawarkan.

Laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Masih banyak masyarakat Provinsi Jambi terkena investasi bodong, dari satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal telah menutupi sebanyak 1,193 entitas investasi ilegal, dan 1.016 Pinjol ilega, serta 251 entitas gadai ilegal per 20 juli 2023. Dari data tersebut ada juga jumlah Entitas yang dihentikan Satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2017-2023 mencapai 139,04 Triliun.

Jenis-jenis scam / investasi bodong

Beberapa jenis scam alias penipuan berkedok investasi menggiurkan yang banyak ditemui di Indonesia antara lain:

1. Arisan Online, Menggandakan uang, "Crypto Mining" & "Robot Trading"

3. Pinjaman online (Pinjol)

Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman online membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak.

Rinjama Rinjaman online sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan financial technology (fintech). Calon nasabah cukup mengisi formulirnya secara online sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencairan atau persetujuan.

Istilah tenor lazim pula dikenal dalam pinjaman online. Tenor adalah jangka waktu pelunasan cicilan hingga jatuh tempo. Ada dua jenis tenor berdasarkan durasinya, yaitu tenor pendek dan tenor durasinya, yaitu tenor pendek dan tenor panjang.

Tenor pendek memiliki waktu pelunasan mulai dari 30 hari hingga dua tahun. Jumlah cicilan yang harus dibayarkan lebih besar karena waktunya singkat, tapi total pengembalian dananya lebih kecil karena bunganya minim.

Tenor panjang biasanya berjangka waktu mulai dari tiga hingga 20 tahun dan digunakan untuk pinjaman berplafon besar. Contoh ini sering dijumpai dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor atau rumah. Meski cicilannya lebih kecil, total dana yang dibayarkan jadi lebih besar dari plafon karena adanya bunga yang harus dibayar.

Jenis-jenis pinjaman online

Pinjaman online juga memiliki beberapa klasifikasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada tiga jenis pinjaman online yang populer di masyarakat, yaitu:

1. Pinjaman Online Tunai, Pinjaman Online Usaha, Peer-to-Peer Lending

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data dan fakta dalam bentuk tertulis atau lisan dari subjek penelitian.

Penelitian ini diawali dengan adanya hasil survey dari OJK, yaitu melihat berbagai program peningkatan literasi keuangan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Kota Jambi dengan alamat kantor : Jalan Prof. DR. Soemantri Barojonegoro No12 A, Kelurahan Selamat, Kota Jambi. Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini yaitu peran OJK Provinsi jambi dalam usaha meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Penelitian

Data primer dari penelitian ini, maka penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara *purposive sampling* kepada Kepala kantor OJK Provinsi Jambi dan karyawan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang dapat mendukung penulis untuk lebih menguatkan sumber data penelitian.

HASIL PENELITIAN

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak OJK Provinsi Jambi dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. *Mengapa literasi keuangan sangat diperlukan oleh masyarakat jambi?*
“ Secara kondisi perekonomian nasional itu pasti nya sangat bergantung kepada lembaga jasa keuangan itu jadi salah satunya, makanya terkait kondisi ekonomi ya ekonomi itu tergantung

- dengan uang terlebih lagi ada lembaga-lembaga formal yang melakukan kegiatan usahanya itu yang berkaitan dengan uang. Ada beberapa juga lembaga keuangan tersebut, terutama lembaga keuangan formal itu juga diatur dan diawasi oleh Otoritas yang terkait, dalam soft copy yang ekonomi mikro lembaga keuangan formal itu contohnya lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan masih banyak lagi. Kalo di otoritas yang lain itu ada koperasi, kemudin perbankan, pembiayaan asuransi semua lembaga itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi.”
2. Apa yang menjadi latar belakang program literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
“ jadi latar belakang dari OJK adalah berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 disitu disampaikan bahwa salah satu tugas dan wewenang OJK adalah melindungi kepentingan masyarakat, OJK melakukan kegiatan edukasi yang nanti dapat meningkatkan literasi masyarakat. Kemudian diperkuat lagi fungsinya OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 terkait dengan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, disitu diwajibkan bahwa OJK dan juga lembaga jasa keuangan dan otoritas yang terkait untuk melakukan kegiatan edukasinya yang ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jadi dasarnya itu mbak menjadi kewenangan OJK tetapi dalam menjalankan fungsinya tersebut OJK ini bersama dengan stakeholder itu menetapkan adanya strategi nasional literasi dan inklusi keuangan SNLIK, dari SNLIK biasanya 5 Tahun terakhir itu 2021 sampai 2025. Nah disitu ditentukan beberapa rotmet yang ditentukan OJK dalam menjalankan fungsi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
 3. Bagaimana cara meningkatkan literasi keuangan di Provinsi Jambi?
“ jadi kalo khusus di Provinsi Jambi sendiri, jadi struktur secara organisasi OJK di Provinsi Jambi itu ada beberapa bagian terutama bagian pengawasan bank, kemudian tugasnya melakukan pemeriksaan kepada perbankan bagian kedua ini terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen dan juga imistrasi dan ini bagian dari salah satu yaitu edukasi dan perlindungan konsumen itu melakukan kegiatan yang sifatnya menjalankan fungsinya OJK dalam melakukan perlindungan konsumen jadi caranya ada 2 yaitu, ada langkah preventif dan langkah kuratif. Langkah Preventif ini contoh nya OJK melakukan edukasi kepada masyarakat provinsi jambi, jadi OJK jambi secara mandiri melakukan inisiasi melakukan kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat sekitar provinsi jambi. Kemudian untuk Kuratif OJK melakukan kegiatan penerimaan pengaduan konsumen misalkan ada masyarakat yang bermasalah terkait produk dan layanan yang digunakan konsumen itu bisa mengadukan ke OJK, gunanya mengadu ke OJK untuk memberikan fasilitas terkait dengan atau menengahi bagaimana caranya atau solusi terbaik terkait permasalahan konsumen dan lembaga jasa itu sendiri.”
 4. Apa dampak dari kurangnya literasi keuangan?
" Yang menjadi permasalahan dasar adalah pastinya akan terjadi permasalahan yang dialami oleh konsumen menggunakan produk itu, jadi misalkan masyarakat tidak begitu paham terkait dengan produk dan layanan yang digunakan maka masyarakat bisa komplek atau bisa mengadu kepada lembaga jasa keuangan dan tentunya. Misalkan ada permasalahan dan memang terjadi kesalah di sisi lembaga jasa keuangannya bearti konsumen akan menerima kerugian, makanya jika masyarakat tidak paham mengenai produk yang dipakainya dikemudian hari akan berpotensi untuk mengalami kerugian."
 5. Bagaimana peran OJK dalam memberantas perusahaan bodong atau ilegal dalam pinjaman online?

"Jadi sekarang ini lagi marak-maraknya investasi bodong OJK dalam melakukan menindak lanjuti investasi bodong OJK membentuk namanya SATGAS PASTI satuan tugas pasti ini adalah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dari satgas ini terdiri dari 12 lembaga kementerian, contohnya OJK, BI, Polri, Kominfo, Kementerian koperasi dll. Jdi sementara itu ada 12 cuma tahun ini akan dilaksanakan atau masuk lagi 2-3 anggota yang baru jadi sekarang namanya SATGAS PASTI kalau dulu SATGAS WASPADA INVESTASI, cuma kalau satgas waspada investasi pasti penekanannya ada di investasi ilegal karena sekarang pinjol ilegal sudah marak jadi diubah menjadi satgas pasti. Nah yang dilakukan oleh satgas ini yaity, satgas ini melakukan kegiatan sama dengan prefentif dan kuratif. Prefentif satgas pasti melakukan kegiatan edukasi sosialisasi dan memberikan informasi melewati media kemudian menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya tawaran-tawaran pinjol ilegal, investasi ilegal. Jadi aktivitas yang ilegal ini berkaitan dengan keuangan itu bisa dilaporkan kepada satgas pasti, kemudian tindakan kuratif yaitu menindak lanjuti terkait dengan laporan masyarakat adanya aktivitas ilegal misalnya, kami melakukan rapat koordinasi dengan anggota satgas pasti dari rapat itu kemudian ditentukan ternyata benar perusahaan tersebut tidak memiliki izin maka kami akan meminta untuk menghentikan usahanya."

6. Bagaimana cara membedakan pinjol legal dan ilegal?

"Pinjol legal atau resmi itu ada daftarnya namanya adalah filtek finansial teknologi, pinjol yang resmi pasti sudah ada izin dari pihak OJK secara badan hukum dia juga ada izin, terkait dengan kegiatan operasionalnya itu pasti sudah diawasi oleh OJK dan sudah diketahui. Dalam menjalankan kegiatan pinjol ini memberikan pinjaman kepada masyarakat kalau di aplikasi online sudah di atur dengan sedemikian rupa oleh pinjol dan sudah diawasi oleh OJK. Kalau pinjol ilegal yaitu kebalikannya yang pasti tidak menggunakan izin dari OJK kemudian dia menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk media yang lebih luas dan tidak sesuai dengan aturan contohnya. Kalau pinjol legal ada aplikasinya akan ada tulisan terdaftar dan izin dari OJK, kalau pinjol ilegal bisa jadi dia menawarkan buka aplikasi di play store atau app store cuma dia banyak yang mencantumkan nama OJK dan badan hukumnya bisa jadi badan hukum indonesia, pada saat waktu buka aplikasi untuk mengunjungi pinjaman masyarakat akan diminta beberapa akses di handphone."

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua landasan teori dan landasan pustaka, analisis pada rumusan masalah pertama mengenai peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

Peran, sebagaimana yang dipaparkan pada landasan teori merupakan tuntutan yang melekat pada seseorang atau lembaga untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Salah satu tujuan di bentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum maupun syariah Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK.

Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan gencar dilakukan oleh OJK Provinsi Jambi. masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengolah keuangan sendiri dengan baik. Sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh OJK Provinsi Jambi untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan literasi pada masyarakat. Oleh karena

itu sosialisasi dan edukasi literasi keuangan harus direncanakan secara sistematis dengan memaksimalkan sumber daya dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik.

A. Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dilakukan dengan berbagai Program

Sosialisasi dan edukasi tentang literasi keuangan semakin gencar di lakukan OJK Provinsi Jambi dimana kemampuan OJK Provinsi Jambi dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi sehingga informasi mengenai kegiatan tersampaikan. Masyarakat harus diberi pengertian mengenai literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan baik individual maupun kelompok. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh OJK Provinsi Jambi adalah merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dalam khususnya meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat, oleh karena itu, sosialisasi atau edukasi literasi keuangan harus direncanakan secara sistematis dengan memaksimalkan sumber data dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik. OJK Provinsi Jambi melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan dengan berbagai cara yang dilakukan yakni dengan:

a. Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi mengenai literasi keuangan telah melaksanakan ?? kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang diantaranya ditujukan kepada UMKM, pelajar/mahasiswa, guru, PNS, dosen, kelompok profesi dan masyarakat lainnya.

b. Melalui Media Massa

Sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Media elektronik menggunakan radio ataupun stasiun televisi lokal, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Jambi dapat termuat di koran-koran atau media cetak. Di bagian internal OJK sendiri juga memiliki majalah yaitu Majalah Blangkon yang hanya untuk kalangan internal OJK dan Industri Jasa Keuangan saja.

- a. Secara langsung, Sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui 2 sistem yaitu, Pertama, sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh karyawan OJK kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan. Kedua, masyarakat yang berkonsultasi secara langsung datang ke kantor OJK Provinsi Jambi.

2. Data literasi dan inklusi keuangan provinsi jambi tahun 2022

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hasil survei nasional dan inklusi keuangan mengenai tingkat literasi keuangan sebagai berikut:

No	Provinsi	Tingkat literasi keuangan	Tingkat inklusi keuangan	
1.	Aceh	49,87%	89,87%	
2.	Sumatera Utara	51,69%	95,58%	
3.	Sumatera Barat	40,78%	76,88%	
4.	Riau	67,27%	85,19%	
5.	Jambi	46,49%	85,19%	
6.	Sumatera Selatan	52,73%	88,57%	
7.	Bengkulu	30,39%	88,05%	
8.	Lampung	41,30%	74,81%	
9.	Bangka Belitung	62,34%	79,48%	
10.	Kepulauan Riau	48,57%	87,01%	
11.	DKI Jakarta	52,99%	96,62%	
12.	Jawa Barat	56,10%	88,31%	
13.	Jawa Tengah	51,69%	85,97%	

PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT

14.	DIY. Yogyakarta	54,55%	82,08%	
15.	Jawa Timur	55,32%	92,99%	
16.	Banten	45,19%	85,71%	
17.	Bali	57,66%	92,99%	
18.	NTB	65,45%	82,34%	
19.	NTT	51,95%	85,97%	
20.	Kalimantan Barat	51,95%	84,16%	
21.	Kalimantan Tengah	32,73%	81,30%	
22.	Kalimantan Selamatan	42,88%	81,56%	
23.	Kalimantan Timur	57,14%	93,25%	
24.	Kalimantan Utara	58,70%	91,69%	
25.	Sulawesi Utara	50,13%	86,23%	
26.	Sulawesi Tengah	56,36%	78,44%	
27.	Sulawesi Selatan	36,88%	88,57%	
28.	Sulawesi Tenggara	31,95%	84,42%	
29.	Gorontalo	52,21%	88,57%	
30.	Sulawesi Barat	46,49%	70,39%	
31.	Maluku	40,78%	78,70%	
32.	Maluku Utara	49,35%	81,04%	
33.	Papua Barat	54,29%	81,30%	
34.	Papua	45,19%	76,36%	

Indeks literasi keuangan di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh pada tahun 2019 tingkat literasi keuangan mencapai 35,19 persen sedangkan pada tahun 2022 tingkat literasi keuangan mencapai 46,49 persen jadi dari tahun 2019-2022 peningkatannya sebesar 11,03 persen Begitu juga dengan tingkat inklusi keuangan pada tahun 2019 mencapai 64,83 persen dan pada tahun 2022 tingkat inklusi keuangan mencapai 85,19 persen jadi peningkatan pada tahun 2019-2022 sebesar 20,36 persen.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan

Berdasarkan hasil survey Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan sebagai berikut:

- a. Tingkat Pendidikan Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan orang tersebut.
- b. Strata Sosial Semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya. Kelompok strata sosial dikelompokkan atas dasar pengeluaran per bulan per kapita.
- c. Kelompok Usia Semakin dewasa usia kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir masyarakat tersebut.

4. Strategi Literasi Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Strategi nasional literasi keuangan indonesia (SNLKI) memiliki 3 pilar, dimana pilar dimaksud diuraikan dalam 5 program strategis dan 16 program inisiatif. Ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang well literate. Adapun kerangka strategi nasional literasi keuangan indonesia adalah :

Pilar ke 1 adalah edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, yang di dukung dengan program strategis yaitu menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan yang meliputi program inisiatif yaitu :

1. Menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan;
2. Menyusun materi edukasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi;
3. Menyusun materi kampanye literasi keuangan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat umum;
5. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan;
6. Melaksanakan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan;

Pilar ke 2 adalah penguatan infrastruktur literasi keuangan, yang didukung dengan program strategis menyusun database materi dan sistem informasi literasi keuangan dan menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya, yang di dukung dengan program inisiatif seperti :

1. Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna 2. meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye literasi keuangan;
3. Membangun sarana media komunikasi;
4. Menyiapkan SDM pelaksanaan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan;
5. Menjalani kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait;
6. Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksanaan literasi keuangan;
7. Mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap literasi keuangan;

Pilar ke 3 adalah pengembangan produk dan jasa keuangan, yang didukung dengan program strategis yaitu mengembangkan dan memasarkan produk jasa keuangansesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan didukung pula dengan program inisiatif seperti :

1. Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk dan jasa yang terjangkau oleh semua golongan;
2. Menciptakan produk dan jasa keuangan yang bersifat bundling (sinergi produk dan jasa antar sektor keuangan guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan);
3. Mendorong sektor jasa keuangan untuk memperluas aksesibilitas;
4. Mendorong sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

KESIMPULAN

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian dilakukan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu tujuan di bentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK.
2. OJK dalam melakukan perlindungan konsumen ada 2 cara yaitu, ada langkah preventif dan langkah kuratif. Langkah Preventif ini contoh nya OJK melakukan edukasi kepada masyarakat provinsi jambi. Kemudian untuk Kuratif OJK melakukan kegiatan penerimaan pengaduan konsumen misalkan ada masyarakat yang bermasalah terkait produk dan layanan yang digunakan konsumen itu bisa mengadukan ke OJK, gunanya mengadu ke OJK untuk memberikan fasilitas terkait dengan atau menengahi bagaimana caranya atau solusi terbaik terkait permasalahan konsumen dan lembaga jasa itu sendiri. Harapannya kedepannya setelah adanya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK Provinsi Jambi kepada masyarakat, akan bisa menambah pemahaman masyarakat tentang literasi dan

produk jasa keuangan serta pemahaman masyarakat akan literasi keuangan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Ed Revisi 2014, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Khatibul Umam, *Perbankan Syari'ah, Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Seri Literasi Keuangan OJK*.
- Nusrion Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012).
- OECD.(2016).PISA 2015 *Assesment and analytical framework science, reading. Mathematic and financial literacy*, PISA, OECD publising, paris.(SNLKI,2017)
- Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan," Direktorat Literasi dan Edukasi (2014).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta 2016
- Otoritas jasa keuangan, *Siaran Pers, OJK : indeks literasi dan keuangan inklusif keuangan dalam* <http://www.ojk.go.id>
- Soetiono, Kusumaningtuti S dan Cecep, Setiawan, *literasi dan inklusi keuangan Indonesia*. Depok: PT, Raja Grafindo. 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis Dan Disertai Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).